

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perekonomian suatu daerah tidak dapat dilepaskan dari dinamika tingkat kemiskinan, tingkat penganggurannya dan upah rata-rata dari para pekerja yang sudah ditentukan oleh pemerintah untuk kesejahteraan masyarakatnya. Pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan menjadi tujuan penting bagi pemerintah daerah, termasuk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yang dikenal sebagai salah satu pusat pendidikan, pariwisata, dan jasa di Indonesia.

Pembangunan ekonomi daerah yang juga merupakan bagian penting dari pembangunan nasional yang sudah menjadi skala besarnya yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta maupun Negara Republik Indonesia yang tercermin di dalam pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dari suatu daerah atau region di dalam suatu negara dapat diukur melalui Produk Domestik Bruto ataupun Produk Domestik Regional Bruto, yang merupakan suatu data indikator utama kesejahteraan masyarakat.

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memiliki struktur ekonomi yang unik, di mana sektor jasa (terutama pariwisata, pendidikan, dan jasa kesehatan) memegang peranan dominan sebagai penopang utama PDRB. Namun di tengah kemajuan itu masih terdapat beberapa kekurangan yang menjadi permasalahan masyarakat di Indonesia dan khususnya di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

itu sendiri dan ini juga sangat berbanding terbalik apabila melihat dari Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini adalah nomor satu di Indonesia, tetapi dengan tingginya Indeks Pembangunan Manusia tersebut tidak dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonominya juga ke arah yang positif, dikarenakan jika melihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS) tingkat kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini relatif tinggi pada tahun 2019 tercatat sebesar 11,44%, sementara di tahun 2024 di kisaran 10,2%, dan angka ini merupakan yang lebih tinggi dari rata-rata nasional itu sendiri yang sebesar 9,4%.

Produk Domestik Bruto itu sebagai jumlah nilai produksi dari barang dan jasa akhir yang dihasilkan atau diperoleh dari setiap sektor yang produktif dalam suatu periode tertentu di dalam suatu negara atau regional (Arsyad, 2015). Produk Domestik Bruto menjadi salah satu elemen penting di dalam mengukur kesejahteraan rakyat negara.

PDB juga dapat mengukur nilai moneter dari barang dan jasa akhir yang diproduksi di suatu negara dalam waktu periode tertentu (Callen, 2008). Dalam hal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat suatu negara ini merupakan indikator yang wajib dilihat oleh pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat suatu negara. Pertumbuhan ekonomi yang kuat dapat mendorong kenaikan upah karena persaingan yang lebih ketat untuk mendapatkan tenaga kerja, Upah dan PDB juga dipengaruhi oleh inflasi. Pertumbuhan PDB yang tinggi terkadang diikuti oleh inflasi, yang memengaruhi daya beli upah. Di sisi lain, upah yang layak dapat menarik lebih banyak tenaga kerja untuk masuk ke pasar kerja,

meskipun perusahaan mungkin akan mengurangi jumlah pekerja jika biaya produksi terlalu tinggi.

Di dalam konteks pembangunan, pertumbuhan ekonomi juga menjadi faktor utama yang harus dilihat dan ditelaah, dan juga sebagai motor utama untuk pengentasan kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun di dalam konteks ini pertumbuhan ekonomi ini sering kali dipertanyakan dalam hal pendistribusiannya kepada masyarakat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu, tingkat pengangguran terbuka (TPT) Daerah Istimewa Yogyakarta juga menunjukkan fluktuasi yang sangat signifikan dari sebesar 3,12% pada tahun 2019 menjadi 4,25% pada tahun 2024, yang juga menjadi faktor terjadinya kenaikan ini adalah COVID-19.

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) adalah persentase angkatan kerja yang aktif mencari kerja namun belum memperoleh pekerjaan tetap menjadi indikator penting kesehatan pasar kerja. Angka TPT yang tinggi menunjukkan adanya hambatan penyerapan tenaga kerja, dan kemungkinan bahwa pekerja yang terserap pun mungkin tidak sesuai dengan keahlian atau pendidikan mereka. Menurut BPS, Tingkat Pengangguran Terbuka adalah persentase jumlah penganggur terhadap jumlah angkatan kerja. Teori Keynes menyatakan bahwa berlawanan dengan Teori Klasik, karena Keynes berpendapat bahwa masalah dari pengangguran timbul disebabkan oleh adanya permintaan agregat yang rendah. Sehingga memperlambat pertumbuhan ekonomi bukan disebabkan oleh rendahnya produksi tetapi rendahnya konsumsi. Keynes berpendapat bahwa hal ini tidak bisa diserahkan ke mekanisme pasar bebas. Ketika tenaga kerja mengalami peningkatan maka upah akan turun dan

penurunan upah tersebut akan mengakibatkan kerugian bukan menguntungkan., karena penurunan upah tersebut menggambarkan daya beli masyarakat terhadap suatu barang. Hal tersebut akan mengakibatkan produsen mengalami kerugian dan tidak dapat menyerap kelebihan tenaga kerja.

Upah rata-rata adalah representasi dari kompensasi yang diterima pekerja. Secara teoritis, upah memiliki dua peran. Di satu sisi, kenaikan upah dapat meningkatkan biaya produksi bagi perusahaan, yang dapat menekan margin keuntungan dan investasi. Namun, di sisi lain, peningkatan upah rata-rata (terutama upah riil) yang sejalan dengan peningkatan produktivitas dapat berfungsi sebagai insentif efisiensi (*efficiency wage theory*) dan meningkatkan daya beli masyarakat (*demand-side effect*), yang akan mendorong permintaan agregat dan mempercepat pertumbuhan PDB. Fluktuasi upah selama periode pandemi dan pemulihan di sektor jasa DIY perlu dikaji korelasinya terhadap *output* ekonomi. Peningkatan upah rata-rata (terutama upah riil) akan meningkatkan pendapatan *disposable* dan, *consequently*. Di DIY, yang PDB-nya sangat bergantung pada konsumsi, peningkatan ini secara langsung mendorong pertumbuhan PDB. Rendahnya upah ini sebagian disebabkan oleh struktur ekonomi yang didominasi sektor jasa berupah rendah, seperti perdagangan, akomodasi, dan industri kreatif. Padahal, jika tenaga kerja dengan keterampilan dan pendidikan tinggi ditempatkan sesuai bidangnya diberi kompensasi yang layak, maka produktivitas sektor jasa dapat meningkat dan mendorong pertumbuhan PDB regional secara signifikan. Periode 2020–2025 menjadi masa penting bagi perekonomian DIY. Pandemi COVID-19 yang melanda sejak 2020 menyebabkan perlambatan ekonomi dan menurunnya produktivitas

tenaga kerja. Banyaknya pengangguran di Indonesia sangat berkaitan erat dengan upah rata-rata yang di berikan oleh perusahaan yang menggaji mereka maupun dari pemerintah itu sendiri yang menetapkan dari UMR dan UMP dari setiap daerah dan provinsi yang berada di Indonesia.

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan mendasar yang dihadapi hampir seluruh negara berkembang, termasuk Indonesia. Masalah kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan, tetapi juga mencakup keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, serta kualitas hidup yang layak. Menurut Todaro & Smith (2011), kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, baik berupa pangan, sandang, papan, pendidikan, maupun kesehatan. Oleh karena itu, kemiskinan mencerminkan kegagalan pembangunan ekonomi dalam menciptakan kesejahteraan yang merata.

Salah satu provinsi yang masih menghadapi persoalan kemiskinan adalah Daerah Istimewa Yogyakarta. Meskipun dikenal sebagai provinsi dengan tingkat pendidikan tinggi dan pusat kegiatan ekonomi kreatif, DIY justru memiliki tingkat kemiskinan tertinggi di Pulau Jawa. Data BPS menunjukkan bahwa pada tahun 2024, tingkat kemiskinan di DIY mencapai sekitar 11,81 persen, jauh di atas rata-rata nasional. Fenomena ini menunjukkan bahwa tingginya tingkat pendidikan dan aktivitas ekonomi belum sepenuhnya berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan di bagian latar belakang, maka rumusan masalah yang telah disusun dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh tingkat kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2019–2024.
2. Bagaimana pengaruh tingkat pengangguran terbuka terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2019–2024.
3. Bagaimana pengaruh upah rata-rata terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Yogyakarta tahun 2019–2024.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh dari tingkat kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2019–2024.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh dari tingkat pengangguran terbuka terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2019–2024.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh dari upah rata-rata terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2019–2024.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah, diharapkan dapat bermanfaat sebagai salah satu bahan referensi untuk melihat pengaruh dari tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka dan upah rata-rata terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Bagi peneliti atau pembaca, penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi dan studi pembandingan atau penelitian yang terkait dengan riset ini.

1.5. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang ada maka dapat dikemukakan hipotesis dalam penelitian sebagai berikut:

1. Diduga bahwa tingkat kemiskinan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2019–2024.
2. Diduga bahwa tingkat pengangguran terbuka berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2019–2024.
3. Diduga bahwa Upah rata-rata berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2019–2024.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini bertujuan untuk memudahkan peneliti dan pembaca dalam memahami secara utuh isi dari penelitian ini. Rencana sistematika penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I dalam penelitian ini akan memaparkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab II dalam penelitian ini akan memaparkan teori serta bukti empiris yang mendukung terkait dengan topik penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab III dalam penelitian ini akan memaparkan data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian, teknik analisis data, dan tahapan analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab IV dalam penelitian ini akan menjabarkan hasil dan pembahasan yang diperoleh dari tahapan analisis data pada model yang telah diestimasi.

BAB V PENUTUP

Bab V dalam penelitian ini akan memaparkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian. Selain itu, pada Bab V ini akan dijabarkan juga mengenai saran yang relevan dengan hasil penelitian ini.

